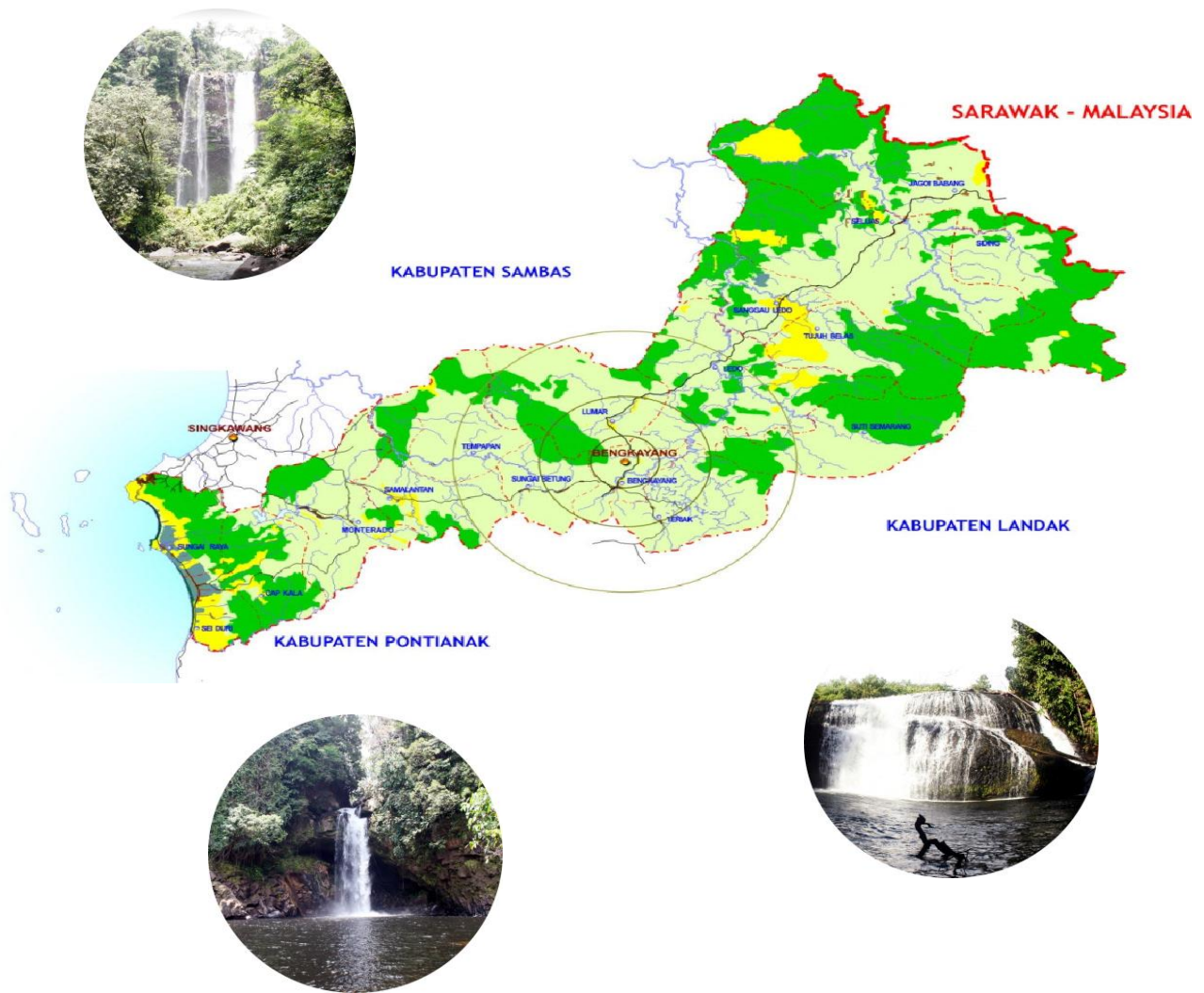


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

**Jln. Guna Baru - Rangkang
BENGKAYANG**



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan, dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai salah satu bahan acuan/rujukan dalam Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bengkayang tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan dan kebijakan operasional di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang serta sebagai alat umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dimasa yang akan datang.

Harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang ini berguna sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Demikian disajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 terkait yang didukung dengan data perjanjian kinerja, yang diperoleh dan disepakati serta ditandatangani langsung oleh Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu



bahan evaluasi yang objektif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkayang.

Bengkayang, 19 Januari 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bengkayang



UCOK P. HASUGIAN, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda IVc
NIP. 19750828 199603 1 002



DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	5
3. Sumber Daya Aparatur (SDA)	7
4. Sumber Daya Keuangan	8
B. Permasalahan Utama	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bengkayang	11
B. Perjanjian Kinerja (PK) 2023 BAPPEDA Kabupaten Bengkayang ..	13
C. Rencana Aksi Tahun 2023 BAPPEDA Kabupaten Bengkayang	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	40
A. Capaian Kinerja Organisasi	40
1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	40
2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan Target Kinerja Tahun 2024	45
B. Realisasi Anggaran	48
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR TABEL	iv



DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1.1 Komposisi Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian, Golongan dan Jenis Kelamin	7
Tabel 1.2 Sumber Daya Keuangan BAPPEDA Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023	9
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kabupaten Bengkayang	13
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 BAPPEDA Kabupaten Bengkayang	14
Tabel 2.3 Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2023 BAPPEDA Kabupaten Bengkayang	16
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 BAPPEDA Kabupaten Bengkayang	40
Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan Target Kinerja Tahun 2024 BAPPEDA Kabupaten Bengkayang	45
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Anggaran BAPPEDA Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023	48
Tabel 3.4 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun 2023 BAPPEDA Kabupaten Bengkayang	48
Tabel 3.5 Jenis Pembelian Peralatan Kantor Tahun 2023 BAPPEDA Kabupaten Bengkayang	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Penilaian dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dilakukan pada setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai sarana bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (BUPATI, DPRD dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang.



Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah selambat-lambatnya akhir bulan Februari setelah tahun anggaran berakhir.

Tujuan Sistem SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan meliputi:

1. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja selain berisi mengenai perjanjian penugasan/pemberian amanah, juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.



3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah.

4. Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan/registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah sebagai kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah.

5. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja tersebut terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.

6. Reviu dan Evaluasi Kinerja

Reviu merupakan langkah dalam rangka untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan. Reviu tersebut dilaksanakan oleh Aparat pengawasan intern pemerintah dan hasil reviu berupa surat pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh Aparat pengawasan intern pemerintah. Sedangkan evaluasi kinerja merupakan evaluasi dalam rangka implementasi SAKIP di instansi pemerintah.

1.1 Kondisi Geografis, Topografis dan Iklim

1.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu kabupaten yang terletak disebelah utara Provinsi Kalimantan Barat. Secara geografis, Kabupaten Bengkayang



terletak di 0°33'00'' Lintang Utara sampai 1°30'00'' Lintang Utara dan 108°39'0'' Bujur Timur 110°10'00'' Bujur Timur.

Secara administratif, batas-batas wilayah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :

- Utara : Kabupaten Sambas
Serawak (Malaysia Timur)
- Selatan : Kabupaten Mempawah
- Timur : Kabupaten Landak
Kabupaten Sanggau
- Barat : Kota Singkawang
Laut Natuna

1.1.2 Topografi dan Sungai

Ada dua kondisi alam yang membedakan wilayah Kabupaten Bengkayang. Kondisi alam yang pertama adalah pesisir pantai. Keseluruhan wilayah pesisir ini termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan. Kondisi alam yang kedua adalah daratan dan perbukitan yang terdiri dari Kecamatan Capkala, Samalantan, Monterado, Lembah Bawang, Bengkayang, Teriak, Sungai Betung, Ledo, Suti Semarang, Lumar, Sanggau Ledo, Tujuh Belas, Seluas, Jagoi Babang dan Siding.

1.1.3 Luas Wilayah

Secara keseluruhan, luas wilayah Kabupaten Bengkayang adalah sebesar 5.396,30 km² atau sekitar 3,68% dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2018, daerah pemerintahan Kabupaten Bengkayang dibagi menjadi 17 kecamatan. Dari sejumlah kecamatan yang ada, Kabupaten Bengkayang dibagi lagi menjadi 2 kelurahan dan 122 desa definitif.

Dilihat dari luas masing-masing kecamatan, Jagoi Babang merupakan kecamatan yang paling luas di Kabupaten Bengkayang dengan cakupan wilayah sebesar 655 km² atau sekitar 12,14 % dari luas Kabupaten Bengkayang keseluruhan dan kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Capkala dengan luas wilayah sebesar 46,35 km² atau hanya sekitar 0,86% dari total luas Kabupaten Bengkayang.



Dilihat dari jarak tempuh terjauh dari ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten di Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Siding adalah kecamatan dengan jarak tempuh terjauh, yaitu sekitar 103,68 km disusul Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Sungai Raya.

1.1.4 Jenis Tanah

Dilihat dari jenis tanahnya, sebagian besar daerah Kabupaten Bengkayang adalah jenis tanah pedsolet merah kuning, yaitu sebesar 3.223,47 km² dan yang paling sedikit adalah jenis OGH, yaitu sebesar 67 km².

Dilihat dari persebaran lerengnya, sebagian besar wilayah Kabupaten Bengkayang masuk pada kelas lereng 15-40% dan hanya sebagian kecil yang masuk dalam kelas lereng lebih dari 40%. Selanjutnya, dilihat dari tekstur tanahnya, sebagian masuk dalam tekstur sedang, yaitu sebesar 3.430,23 km². Luas wilayah tergenang di Kabupaten Bengkayang hanya sebesar 360,20 km² dan luas wilayah yang tidak tergenang adalah sebesar 5.036,10 km².

1.1.5 Pulau-pulau

Walaupun hanya sebagian kecil wilayah Kabupaten Bengkayang yang merupakan wilayah perairan laut, Kabupaten Bengkayang juga memiliki sejumlah pulau yaitu sebanyak 12 pulau. Dari sejumlah pulau tersebut, ada sebanyak 6 pulau masih belum berpenghuni dan 6 pulau sudah berpenghuni. Semua pulau yang ada terletak di wilayah perairan Laut Natuna. Pulau terbesar yang berpenghuni adalah Pulau Lemukutan dan Pulau Kabung.

2. Susunan Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkayang dibentuk berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Barat No.137 Tahun 1999 mengacu pada KEPRES No.27 Tahun 1980 Jo.KEPMENDAGRI No.185 Tahun 1980 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA TK.I dan BAPPEDA TK.II. Selanjutnya sejalan dengan semangat OTDA yang tertuang dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1999 dan Peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka BAPPEDA TK.II Bengkayang direstrukturisasi menjadi Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan (BAPEDALBANG) Kabupaten Bengkayang melalui



PERDA Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi Daerah TK.I dan TK.II dan direvisi kembali menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2003 tentang Revisi Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah serta diatur kembali dalam Perubahan pertama kali Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang, dan dalam rangka menyesuaikan serta mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, serta berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional perlu dilakukan penyesuaian tugas pokok, fungsi dan struktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang; dan diperjelas lagi dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 97 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang.

Adapun susunan organisasi BAPPEDA Kabupaten Bengkayang berdasarkan PERBUP Nomor 97 Tahun 2021 tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kepala BAPPEDA
- b. Sekretariat BAPPEDA

Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Dua Sub Bagian yaitu :

1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan
- c. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Penelitian Pembangunan



g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) hingga saat ini belum terisi atau belum difungsikan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional sudah terisi atau sudah difungsikan dengan jumlah 10 (sepuluh) PNS yang diangkat dan dilantik melalui penyetaraan jabatan, yaitu 8 (delapan) PNS Jabatan Fungsional Perencana, 1 (satu) PNS Jabatan Fungsional Analis Data, dan 1 (satu) PNS Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.

3. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkulu didukung jumlah aparatur/pegawai sebanyak 31 orang dan 8 orang tenaga honorer. Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian, golongan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1.A.4 berikut ini :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian, Golongan dan Jenis Kelamin

NO	STATUS / JENIS KELAMIN		GOL. I				GOL. II				GOL. III				GOL. IV				JUMLAH
			a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	PNS	L	-	-	-	-	-	-	1	1	5	1	3	5	2	-	1	-	19
		P	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	4	1	1	-	-	-	12
JUMLAH PNS			-	-	-	-	-	-	3	1	8	2	7	6	3	-	1	-	31
II	CPNS	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH CPNS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL			-	-	-	-	-	-	3	1	8	2	7	6	3	-	1	-	31

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 31 orang dan tenaga honorer sebanyak 8 orang yang tersedia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu tahun 2023 yang terdiri dari :



❖ **Jumlah Pegawai menurut Pangkat dan Golongan**

- Golongan IV	4 Orang
- Golongan III	23 Orang
- Golongan II	4 Orang

Jumlah	31 Orang
--------	----------

❖ **Jumlah Pegawai menurut Eselon**

- Eselon II	1 Orang
- Eselon III	6 Orang
- Eselon IV	2 Orang
- Jabatan Fungsional	10 Orang
- Staf Non Eselon	12 Orang

Jumlah	31 Orang
--------	----------

❖ **Jumlah Pegawai menurut Pendidikan**

- Doktor (S3)	- Orang
- Pasca Sarjana (S2)	5 Orang
- Sarjana (S1) / Diploma IV	21 Orang
- Diploma D3	2 Orang
- SLTA/SMK	3 Orang
- Lainnya	0 Orang

Jumlah	31 Orang
--------	----------

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Kab. Bengkayang 2023

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan profesionalisme aparatur akan terus dilakukan upaya-upaya penambahan jumlah aparatur di BAPPEDA Kabupaten Bengkayang dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Bengkayang.

4. Sumber Daya Keuangan

Sumber dana untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan dalam tahun 2023, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu Belanja



Operasi sebesar **Rp. 7.120.385.670,00** sedangkan Belanja Modal sebesar **Rp. 158.021.500,00**.

Tabel 1.2
Sumber Daya Keuangan BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Tengah
Tahun Anggaran 2023

No.	Jenis Belanja	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Operasi	8.010.875.739,00	7.120.385.670,00	- 890.490.069,00	88,88
	- Belanja Pegawai	3.354.094.904,00	3.482.182.142,00	128.087.238,00	103,82
	- Belanja Barang dan Jasa	4.656.780.835,00	3.638.203.528,00	- 1.018.577.307,00	78,13
2	Belanja Modal	82.870.000,00	158.021.500,00	75.151.500,00	190,69
	- Belanja Peralatan dan Mesin	82.870.000,00	158.021.500,00	75.151.500,00	190,69
	Jumlah	8.093.745.739,00	7.278.407.170,00	- 815.338.569,00	89,93

B. PERMASALAHAN UTAMA

Laporan Kinerja Tahunan (LKj Tahunan) disusun untuk memenuhi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan dan RB NO. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Tahunan (LKj Tahunan). Laporan Kinerja Tahunan (LKj Tahunan) merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Tahunan (LKj Tahunan) disusun dengan maksud adalah sebagai pelaporan atas pelaksanaan dokumen rencana daerah sesuai dengan ketentuan terkait laporan penyelenggaraan pemerintahan dan tujuan adalah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian hasil pelaksanaan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Tengah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.



Adapun isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing berbasis SDA Unggulan;
2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing;
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar;
4. Memperkuat kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital;
5. Meningkatkan ketahanan bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan konduktifitas kewilayahan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN BENGKAYANG

RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Bengkayang disusun dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026. RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Bengkayang tersebut dijabarkan kedalam Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kabupaten Bengkayang yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam RENJA BAPPEDA Kabupaten Bengkayang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. Program dan kegiatan yang dilaksanakan BAPPEDA Kabupaten Bengkayang mendukung Visi-Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, adapun Visi Pembangunan Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026, adalah : “Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing ditopang Pemerintahan yang Bersih dan Terbuka”. Visi tersebut akan diwujudkan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan Daerah, sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan kualitas daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas sekaligus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel, dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha.
- 3) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah, yaitu



mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman untuk menggerakkan perekonomian daerah, menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- 4) Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata, yaitu mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata sesuai dengan potensi daerah untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa, yaitu mendorong peningkatan ketersediaan sarana prasarana desa termasuk ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa serta peningkatan status desa menjadi desa mandiri.
- 6) Melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan yang optimal, yaitu mendorong peningkatan ketersediaan infrastruktur perbatasan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan peningkatan arus barang dan orang di kawasan perbatasan.
- 7) Mewujudkan pembangunan daerah berwawasan lingkungan, yaitu proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan kondisi sumber daya dan lingkungan secara lestari.

• TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkayang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan Strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana



visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan Strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkayang merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan. Penetapan sasaran Strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau operasional tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran Strategis ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan Strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkayang serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

Adapun tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dalam rangka mewujudkan Misi Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang

Tujuan	Sasaran/ Indikator Kinerja Utama
1. Melakukan Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Daerah.	1. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. a) Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
	2. Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan untuk Pembangunan Daerah. a) Kemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan



B. PERJANJIAN KINERJA (PK) 2023 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN BENGKAYANG

Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan RENSTRA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang, yang akan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan tahun 2023.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya yang meliputi indikator *input*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*. Dokumen Perjanjian Kinerja juga memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Penetapan indikator-indikator kinerja baik pada tingkat sasaran maupun pada tingkat kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisir sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. BAPPEDA Kabupaten Bengkayang pada tahun 2023 telah menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja yang memuat program ataupun kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026. Adapun Perjanjian Kinerja BAPPEDA Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 yang diturunkan kedalam program kegiatan tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	80%
2	Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan untuk Mendukung Pembangunan Daerah	Kemanfaatan Hasil Penelitian & pengembangan	85%



C. RENCANA AKSI TAHUN 2023 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

Rencana aksi ini menggambarkan dan menguraikan serta menjelaskan bagaimana Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut dari sektor yang bersangkutan akan diterapkan dan dicapai dalam periode tertentu, atau bagaimana proses dan tahapan atau mekanisme penerapan dan pencapaian SPM. Kegunaan dan manfaat dari rencana aksi adalah sebagai :

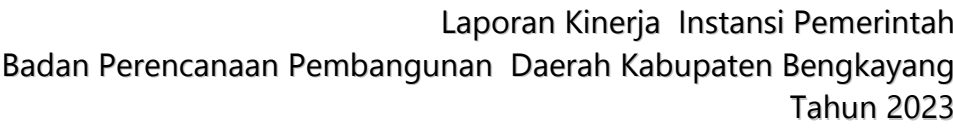
1. Alat koordinasi bagi para pihak yang berkepentingan dalam penerapan dan pencapaian SPM;
2. Pedoman dan arahan dalam perencanaan atau penyusunan rencana tahunan penerapan dan pencapaian SPM termasuk dalam penganggaran tahunannya;
3. Pedoman dan arahan pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM;
4. Pedoman dan arahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM;
5. Pedoman dan arahan bagi pelaporan pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM serta memberikan umpan balik dan rekomendasi bagi penyusunan rencana aksi periode selanjutnya;
6. Pedoman dan arahan untuk memudahkan pengintegrasian penerapan dan pencapaian SPM ke dalam mekanisme dan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

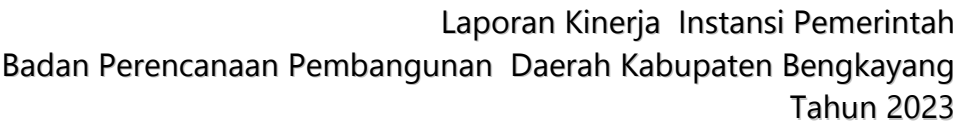
Adapun Penyusunan Rencana Aksi BAPPEDA Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 tercantum dalam tabel 2.3, yaitu :

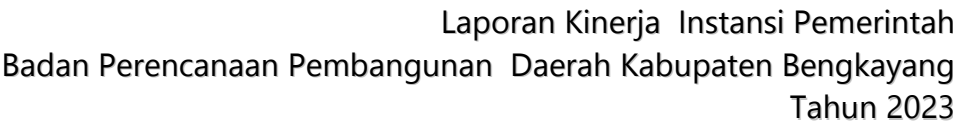


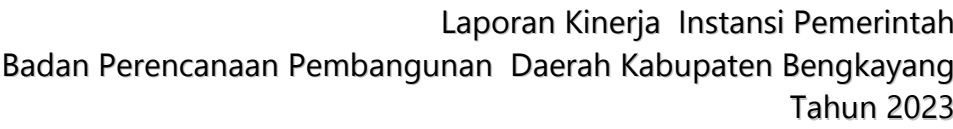
TABEL 2.3
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

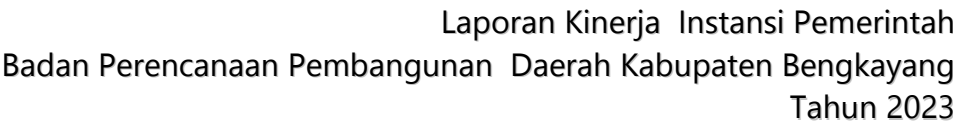
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan			Indikator Sub Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp.)	Penang gung Jawab	Jadwal Kegiatan												Ket			
											TR1			TR2			TR3			TR4						
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10												11			
1. Meni ngkat nya Kualit as Doku men Peren canaa n Pemb angun an Daera h	1. Indek s Peren canaa n Pemb angun an Daera h	80%	1. Program Perencana an, Pengangg ran & Evaluasi Kinerja Pembang unan Daerah	a. Perencana an, Pengangg ran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Penyusun an Dokumen Perencan aan Perangkat Daerah	1) Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024	4 dokumen	Tersedia nya Rencana Kerja OPD setiap Satu Tahun	2.830.450	Sub Bagian RENJA & Keuang an			√				√								APBD Murni	
					2) Koordinas i & Penyusun an Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA OPD					1 Dokumen	Tersedia nya Rencana Kerja Murni OPD	1.761.000	Sub Bagian RENJA & Keuang an		√	√		√							APBD Murn i
					3) Koordinas i & Penyusun an Dokumen Perubaha n RKA- SKPD	Dokumen RKA Perubahan OPD	1 Dokumen	Tersedia nya Rencana Kerja Perubaha n OPD	3.175.300	Sub Bagian RENJA & Keuang an										√						APBD Murn i
					4) Koordinas i & Penyusun an DPA- SKPD	Dokumen DPA OPD	1 Dokumen	Tersedia nya Dokumen Anggaran Murni	3.464.000	Sub Bagian RENJA & Keuang			√													

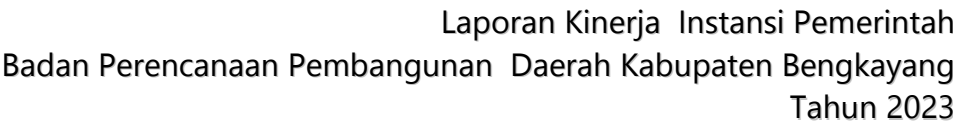
17

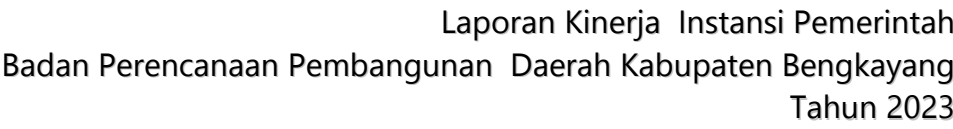
18

19

20

21

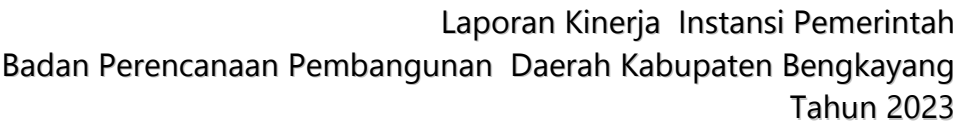
22

23



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2023

					2) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	80%	Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	55.414.200	Bidang Perencanaan, Penguasaan & Litbang	√	√	√	√	√						√		APBD Murni
					3) Pelaksanaan Konsultasi Publik	Berita Acara Konsultasi Publik untuk Penyusunan RKPD Tahun 2024	80%	Pelaksanaan Konsultasi Publik	46.769.300	Bidang Perencanaan, Penguasaan & Litbang		√											APBD Murni
					4) Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara Forum OPD untuk Penyusunan RKPD Tahun 2024	80%	Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	11.248.000	Bidang Perencanaan, Penguasaan & Litbang			√	√									APBD Murni
					5) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara Musrenbang Kabupaten untuk Penyusunan RKPD Tahun 2024	80%	Terlaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	35.048.300	Bidang Perencanaan, Penguasaan & Litbang				√									APBD Murni

25



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu
Tahun 2023

					2) Pembinaan & Pemanfaatan Data & Informasi Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah	Orang yang dibina dalam Pemanfaatan Data & Informasi	70%	Pembinaan dalam Pemanfaatan Data & Informasi	21.655.600	Bidang Perencanaan, Penguasaan & Litbang			√	√	√											APBD Murni
					3) Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Buku Profil Pembangunan Kabupaten Bengkulu	70%	Menyediakan Profil Pembangunan di Kabupaten Bengkulu	20.156.700	Bidang Perencanaan, Penguasaan & Litbang			√	√	√											APBD Murni
				c. Pengendalian, Evaluasi & Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan & Pelaksanaan Pembangunan daerah di Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan & Pelaksanaan Pembangunan	80%	Mengkoordinasikan Perencanaan & Pelaksanaan Pembangunan	43.353.000	Bidang Perencanaan, Penguasaan & Litbang		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Murni
					2) Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Kerjasama Daerah yang dikoordinasikan Pelaksanaannya	80%	Mengendalikan Pelaksanaan Kerjasama Daerah	35.219.000			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	



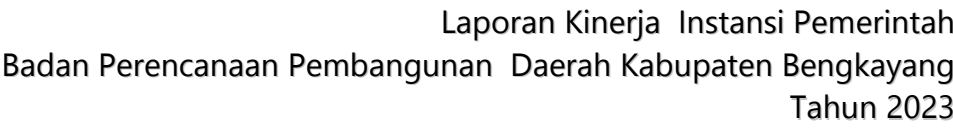
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu
Tahun 2023

					3) Monitoring, Evaluasi & Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1) Jumlah Rapat & Fasilitasi Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80%	Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Daerah	92.275.900		√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						2) Jumlah Laporan Monev, Pengendalian & Laporan PRPD	80%													
						3) Jumlah Laporan SPM, DAK & Pelaporan Lainnya	80%													
			3. Program Koordinasi & Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia	1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Baik	80%	Memfasilitasi & Mengkoordinasikan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	68.542.600	Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia	√	√	√	√	√	√				APBD Murni



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu
Tahun 2023

					2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terwujudnya Dokumen Hasil Asistensi	80%	Memfasilitasi Asistensi Dokumen Bidang Pemerintahan	28.746.000	Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia	√	√	√	√		√		APBD Murni
					3) Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terselenggaranya Monev Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	80%	Melaksanakan Monev Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	29.770.200	Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia	√	√	√	√		√		APBD Murni

29



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2023

					6)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terwujudnya Dokumen Hasil Asistensi	80%	Melaksanakan Monev Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia	51.410.000	Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia	V	V	V			V		V		APBD Murni
					7)	Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terselenggaranya Monev Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia	80%	Melaksanakan Monev Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia	87.585.000	Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia		V	V			V				APBD Murni



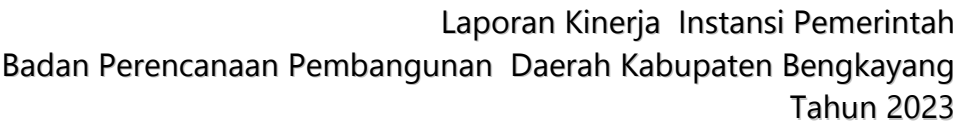
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu
Tahun 2023

					8) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas & Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sinergitas & Harmonisasi dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia	80%	Melaksanakan Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia yang Sinergi & Harmonis	106.218.800	Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia	√	√	√	√	√	√	√	√		APBD Murni
				b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian & SDA (Sumber Daya Alam)	1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Baik	7 OPD	Memfasilitasi & Mengkoordinasikan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	64.460.000	Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam	√	√	√	√	√	√	√	√		APBD Murni



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2023

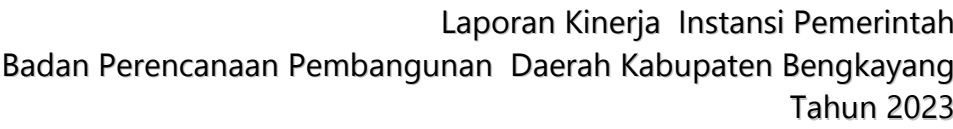
					2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terwujudnya Dokumen Hasil Asistensi	7 OPD	Memfasilitasi Asistensi Dokumen Bidang Perekonomian	12.798.200	Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam			√		√	√	√	√	√		APBD Murni
					3) Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terselenggaranya Monev Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	7 OPD	Melaksanakan Monev Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	22.533.800	Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam			√			√	√	√	√		APBD Murni

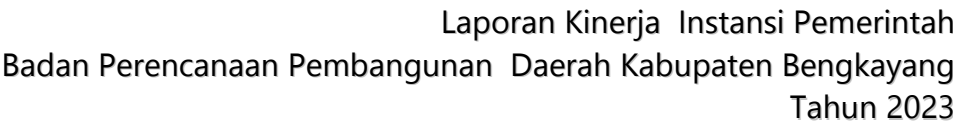
33

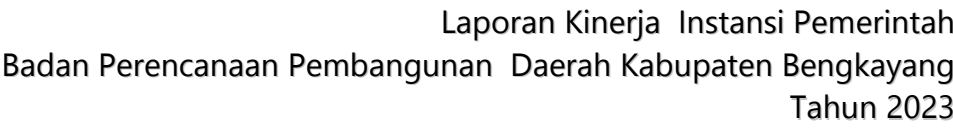


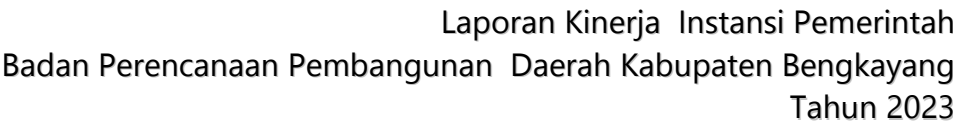
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu
Tahun 2023

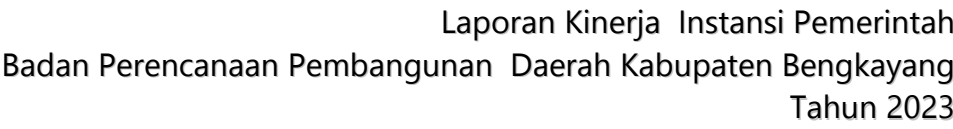
					6)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terwujudnya Dokumen Hasil Asistensi	7 OPD	Memfasilitasi Asistensi Dokumen Bidang Sumber Daya Alam	20.484.750	Bidang Perencanaan & Sumber Daya Alam	√				√		√	√		APBD Murni
					7)	Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terselenggaranya Monev Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam	7 OPD	Melaksanakan Monev Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam	27.132.400	Bidang Perencanaan & Sumber Daya Alam					√		√			APBD Murni
					8)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas & Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Sinergitas & Harmonisasi dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam	7 OPD	Melaksanakan Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam yang Sinergi & Harmonis	60.019.600	Bidang Perencanaan & Sumber Daya Alam		√	√		√	√	√			APBD Murni

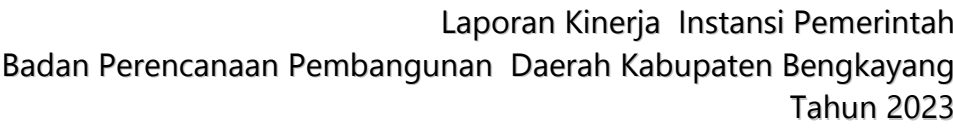
35

36

37

38

39

40



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Tahunan SKPD. Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mengetahui hasil capaian kinerja pada suatu organisasi SKPD dapat dilakukan dengan analisis capaian kinerja untuk beberapa hal berikut ini :

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	80%	80%	100%
2. Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan untuk Mendukung Pembangunan Daerah	Kemanfaatan Hasil Penelitian & pengembangan	85%	75%	88,24%

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu adalah sebagai berikut :



Sasaran 1

Pengukuran untuk ketercapaian Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah yang menghasilkan capaian kinerja 100%.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di tahun 2023 yang mendukung *Sasaran 1* diatas adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - 1) Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
 - 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - 4) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
 - 5) Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - 6) Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
 - 7) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
 - 3) Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
 - 2) Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
 - 3) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala



Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 2) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - 4) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
 - 5) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 6) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - 7) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - 8) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
 - b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 2) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - 4) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 - 5) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD & RKPD)



- 6) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 - 7) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 - 8) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.
- c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- 1) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 2) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - 4) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
 - 5) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 6) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
 - 7) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
 - 8) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

Sasaran 2

Pengukuran untuk ketercapaian Sasaran 2 : Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan untuk Mendukung Pembangunan Daerah.

Dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Kedua yaitu Kemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan, dengan menghasilkan capaian kinerja 88,24%.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di tahun 2023 yang mendukung *Sasaran 2* diatas adalah sebagai berikut :

1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah



- a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - 1) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
- b. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 - 1) Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
 - 2) Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
 - 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian kinerja masing-masing sasaran sudah tercapai tetapi belum optimal. Belum optimalnya pencapaian sasaran di atas antara lain disebabkan beberapa hambatan/kendala dalam pelaksanaan kegiatannya yaitu sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) di OPD masih kurang;
2. Besaran UP (Uang Persediaan) yang terlalu kecil sehingga Pengajuan GU (Ganti Uang) selanjutnya menyebabkan Penyerapan Lambat & ada beberapa Sub Kegiatan dilaksanakan di Semester II;
3. Kurangnya Inovasi yang dilakukan Perangkat Daerah;
4. Masih lemahnya pemahaman Perangkat Daerah terhadap pentingnya data-data sebagai bagian dari proses pembangunan;
5. Masih adanya beberapa Program dalam RKPD yang tidak selaras dengan Program dalam RPJMD.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkayang akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pendidikan & Latihan Teknis ASN di OPD sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dapat bekerja secara optimal;
2. Besaran UP (Uang Persediaan) di rasionalisasi sesuai dengan Time Schedule Rencana Anggaran Kas (RAK) di OPD;
3. Meningkatkan upaya dukungan dan Pembinaan terhadap OPD;
4. Meningkatkan Pemahaman OPD dan Ketersediaan Data;



5. Menselaraskan Program dalam RKPD dengan Program dalam RPJMD pada tahun selanjutnya.

Dari seluruh sasaran, kebijakan dan program yang telah diuraikan di atas, sasaran yang ditetapkan dan ingin dicapai dalam tahun anggaran 2023 adalah meliputi 2 (dua) sasaran, 3 (tiga) program utama dan 8 (delapan) kegiatan serta 41 (empat puluh satu) sub kegiatan pembangunan, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan Target Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.2

Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan Target Kinerja Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu

No.	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target 2024
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum di OPD BAPPEDA Kabupaten Bengkulu	1 Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum	-	100%	-	-
2	Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Proses Penganggaran	1.1 Jumlah Dokumen Perencanaan yang Baik	4 dokumen	-	-	-
		1.2 Jumlah Dokumen RENJA OPD yang Berkualitas Baik	20 OPD	-	-	-
		2.1 Persentase Program RKPD yang selaras terhadap Program RPJMD	-	92,79%	-	-
		2.2 Persentase OPD yang RENSTRA-nya selaras dengan RPJMD	-	92,79%	-	-
		2.3 Persentase OPD yang RENJA-nya selaras dengan RENSTRA	-	100%	-	-
		2.4 Persentase OPD yang RENJA-nya selaras dengan RKPD	-	100%	-	-
3.	Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan untuk Mencapai Perencanaan Daerah yang Berkualitas	1 Jumlah Penelitian dan Pengembangan yang dapat Termanfaatkan	3 penelitian	-	-	-
		2 Persentase Penelitian dan Pengembangan yang dapat Termanfaatkan	-	100%	-	-
4.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	80%	85%
5.	Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan untuk Mendukung Pembangunan Daerah	1 Kemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	-	-	75%	85%



Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2021, 2022, 2023 dan Target Kinerja tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :

Sasaran 1

Pengukuran untuk ketercapaian Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum di OPD BAPPEDA Kabupaten Bengkayang.

Pola pembangunan berjangka digunakan 1 indikator kinerja sasaran, dengan realisasi kinerja tahun 2022, yaitu :

1. Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum, dengan realisasi indikator sasaran tersebut yaitu 100%.

Sasaran 2

Pengukuran untuk ketercapaian Sasaran 1 terjadi revisi berupa perampangan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 7 (tujuh) menjadi 2 (dua) dalam Sasaran Strategis dengan kaitan dalam ketepatan capaian RENSTRA dan RPJMD : Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Proses Penganggaran.

Pola pembangunan berjangka revisi Sasaran Strategis digunakan 4 (empat) indikator kinerja sasaran, dengan target dan realisasi kinerja mulai tahun 2021 dan 2022 yaitu :

- 1 Jumlah Dokumen Perencanaan yang Baik

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan realisasi kinerja pada tahun 2021 yaitu 4 dokumen (86,81%).

2. Jumlah Dokumen RENJA OPD yang Berkualitas Baik

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan realisasi kinerja pada tahun 2021 yaitu 20 OPD (100%).

Sedangkan pada pola pembangunan berjangka revisi Sasaran Strategis digunakan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, dengan target dan realisasi kinerja tahun 2022 yaitu :

1. Persentase Program RKPD yang selaras terhadap Program RPJMD

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan realisasi kinerja pada tahun 2022 yaitu 92,79%.

2. Persentase OPD yang RENSTRA-nya selaras dengan RPJMD

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan realisasi kinerja pada tahun 2022 yaitu 92,79%.

3. Persentase OPD yang RENJA-nya selaras dengan RENSTRA



Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan realisasi kinerja pada tahun 2022 yaitu 100%.

4. Persentase OPD yang RENJA-nya selaras dengan RKPD

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan realisasi kinerja pada tahun 2022 yaitu 100%.

Sasaran 3

Pengukuran untuk ketercapaian Sasaran 3 : Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan untuk Mencapai Perencanaan Daerah yang Berkualitas.

Pola pembangunan berjangka digunakan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, dengan target dan realisasi kinerja mulai tahun 2020 dan 2021 yaitu :

1. Jumlah Penelitian dan Pengembangan yang dapat Termanfaatkan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan realisasi kinerja pada tahun 2020 dan 2021 yaitu 2 dan 3 penelitian.

Sedangkan pada pola pembangunan berjangka revisi Sasaran Strategis memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran, dengan target dan realisasi kinerja tahun 2022 yaitu :

1. Persentase Penelitian dan Pengembangan yang dapat Termanfaatkan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan realisasi kinerja pada tahun 2022 yaitu 100%.

Sasaran 4

Pengukuran untuk ketercapaian Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Proses Penganggaran.

Pola pembangunan berjangka digunakan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, dengan target kinerja mulai tahun 2023 dan 2024 yaitu :

1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Target Kinerja Indikator Sasaran tersebut sebesar 80% pada tahun 2023 dan 85% pada tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan realisasi kinerja pada tahun 2023 yaitu 80% dengan capaian kinerja 100%.

Sasaran 5

Pengukuran untuk ketercapaian Sasaran 5 : Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan untuk Mendukung Pembangunan Daerah.



Pola pembangunan berjangka digunakan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, dengan target kinerja mulai tahun 2023 dan 2024 yaitu :

1. Kemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan

Target Kinerja Indikator Sasaran tersebut sebesar 85% dan 85% pada tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan realisasi kinerja pada tahun 2023 yaitu 75% dengan capaian kinerja 88,24%.

B. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkayang berupa anggaran dan belanja pada tahun 2023. Anggaran belanja untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkayang pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Anggaran
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2023

No.	Jenis Belanja	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Setelah Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5
1	Belanja Operasi	7.120.385.670,00	6.849.070.191,00	- 271.315.479,00
	- Belanja Pegawai	3.482.182.142,00	3.452.946.489,00	- 29.235.653,00
	- Belanja Barang dan Jasa	3.638.203.528,00	3.396.123.702,00	- 242.079.826,00
2	Belanja Modal	158.021.500,00	155.100.000,00	- 2.921.500,00
	- Belanja Peralatan dan Mesin	158.021.500,00	155.100.000,00	- 2.921.500,00
	Jumlah	7.278.407.170,00	7.004.170.191,00	- 274.236.979,00

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan sampai akhir tahun 2023 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun 2023
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang

No.	Nama Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Anggaran Setelah perubahan (RP)	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.779.122.620,00		4.615.208.997,00	96,57



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2023

a.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.580.550,00		26.560.300,00	81,52
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.830.450,00	8 dokumen	1.720.500,00	60,79
	- Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.761.000,00	1 dokumen	1.483.000,00	84,21
	- Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.175.300,00	1 dokumen	1.461.000,00	46,01
	- Koordinasi & Penyusunan DPA-SKPD	3.464.000,00	1 dokumen	3.464.000,00	100
	- Koordinasi & Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.688.800,00	1 dokumen	1.270.000,00	47,23
	- Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.073.000,00	2 dokumen	8.613.400,00	85,51
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.588.000,00	2 dokumen	8.548.400,00	99,54
b.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.365.490.842,00		3.349.342.089,00	99,52
	- Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	3.352.690.142,00	31 Orang	3.341.512.489,00	99,67
	- Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.944.500,00	1 dokumen	3.301.400,00	47,54
	- Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5.856.200,00	2 dokumen	4.528.200,00	77,32
c.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.000.000,00		5.835.000,00	97,25
	- Pendidikan & Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas & Fungsi	6.000.000,00	39 orang	5.835.000,00	97,25
d.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	488.055.400,00		460.241.535,00	94,30
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.825.400,00	3 jenis	6.505.000,00	95,31
	- Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	84.127.000,00	34 jenis	78.703.800,00	93,554
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.095.000,00	12 jenis	10.000.000,00	99,06
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.690.000,00	45 orang	29.690.000,00	71,22
	- Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	30.250.000,00	6 jenis	20.430.000,00	67,54
	- Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	7.100.000,00	10 kali	6.980.000,00	98,31
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	307.968.000,00	45 orang	307.932.735,00	99,99
e.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	158.021.500,00		155.100.000,00	98,15
	- Pengadaan Mebel	63.509.500,00	5 jenis	62.400.000,00	98,25
	- Pengadaan Peralatan & Mesin Lainnya	94.512.000,00	6 jenis	92.700.000,00	98,08
f.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	569.599.128,00		484.647.645,00	85,09
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.200.000,00	500 jenis	8.200.000,00	100,00
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	172.800.000,00	6 jenis	134.213.042,00	77,67
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	388.599.128,00	3 jenis	342.234.603,00	88,07
g.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.375.200,00		133.482.428,00	83,75
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	111.735.200,00	2 jenis	92.348.628,00	82,65



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu
Tahun 2023

		- Pemeliharaan Peralatan & Mesin Lainnya	47.640.000,00	5 jenis	41.133.800,00	86,34
2		Program Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah	933.044.300,00		884.223.037,00	94,77
	a.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan & Pendanaan	669.923.200,00		655.284.662,00	97,81
		- Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan & Isu Strategis Pembangunan Daerah	31.719.100,00	7 dokumen	31.017.300,00	97,79
		- Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	55.414.200,00	7 dokumen	52.780.802,00	95,25
		- Pelaksanaan Konsultasi Publik	46.769.300,00	1 Berita Acara	43.349.300,00	92,69
		- Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	11.248.000,00	3 Berita Acara	7.784.000,00	69,20
		- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	35.048.300,00	1 Berita Acara	34.349.500,00	98,01
		- Penyusunan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	27.960.100,00	17 kecamatan	27.125.100,00	97,01
		- Koordinasi Penyusunan & Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	461.764.200,00	3 dokumen	458.878.660,00	99,38
	b.	Kegiatan Analisis Data & Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	92.273.200,00		78.788.135,00	85,39
		- Analisis Data & Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	50.460.900,00	2 masukan	40.064.535,00	79,40
		- Pembinaan & Pemanfaatan Data & Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	21.655.600,00	43 orang	20.220.500,00	93,37
		- Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	20.156.700,00	1 buku	18.503.100,00	91,80
	c.	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi & Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	170.847.900,00		150.150.240,00	87,89
		- Koordinasi Pengendalian Perencanaan & Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	43.353.000,00	4 laporan	41.787.240,00	96,39
		- Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	35.219.000,00	2 kerjasama	33.946.600,00	96,39
		- Monitoring, Evaluasi & Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	92.275.900,00	3 laporan	74.416.400,00	80,65
3.		Program Koordinasi & Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.265.616.250,00		1.208.894.257,00	95,52
	a.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia	446.872.000,00		421.573.560,00	94,34
		- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD & RKPD)	68.542.600,00	9 dokumen	64.240.882,00	93,72
		- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	28.746.000,00	9 OPD	28.265.700,00	98,33
		- Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	29.770.200,00	9 laporan	28.995.600,00	97,40
		- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas & Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	31.685.900,00	9 laporan	31.144.509,00	98,29



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2023

	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD & RKPD)	42.913.500,00	9 dokumen	39.495.266,00	92,03
	- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	51.410.000,00	9 OPD	43.478.840,00	84,57
	- Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	87.585.000,00	9 laporan	80.747.803,00	92,19
	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas & Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	106.218.800,00	9 laporan	105.204.960,00	99,05
b.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian & SDA	335.656.350,00		310.226.784,00	92,42
	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD & RKPD)	64.460.000,00	2 dokumen	61.248.429,00	95,02
	- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	12.798.200,00	7 OPD	10.876.116,00	84,98
	- Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	22.533.800,00	3 OPD	19.338.000,00	85,82
	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas & Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	39.747.600,00	5 laporan	32.645.800,00	82,13
	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD & RKPD)	88.480.000,00	2 dokumen	87.897.799,00	99,34
	- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	20.484.750,00	2 OPD	15.891.040,00	77,57
	- Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	27.132.400,00	2 OPD	25.994.900,00	95,81
	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas & Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	60.019.600,00	2 laporan	56.334.700,00	93,86
c.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur & Kewilayahan	483.087.900,00		477.093.913,00	98,76
	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD & RKPD)	39.029.800,00	6 dokumen	38.829.380,00	99,49
	- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	58.385.950,00	6 OPD	56.310.930,00	96,45
	- Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	25.420.000,00	6 OPD	24.796.500,00	97,55
	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas & Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	57.565.000,00	6 laporan	57.562.900,00	100



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu
Tahun 2023

		- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD & RKPD)	177.474.950,00	6 dokumen	176.828.200,00	99,64
		- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	40.515.200,00	6 OPD	38.373.900,00	94,71
		- Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	44.309.000,00	6 OPD	44.173.000,00	99,69
		- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas & Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	40.388.000,00	6 laporan	40.219.103,00	99,58
4.		Program Penelitian & Pengembangan Daerah	300.624.000,00		295.843.900,00	98,41
	a.	Kegiatan Penelitian & Pengembangan Bidang Ekonomi & Pembangunan	269.090.000,00		267.505.000,00	99,41
		- Penelitian & Pengembangan Perhubungan	269.090.000,00	1 dokumen	267.505.000,00	99,41
	b.	Kegiatan Pengembangan Inovasi & Teknologi	31.534.000,00		28.338.900,00	89,87
		- Penelitian, Pengembangan & Perekayasaan di Bidang Teknologi & Inovasi	2.555.000,00	1 dokumen	2.364.000,00	92,52
		- Sosialisasi & Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbitan	9.016.000,00	1 laporan	8.765.000,00	97,22
		- Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	19.963.000,00	1 laporan	17.209.900,00	86,21
		Jumlah	7.278.407.170,00		7.004.170.191,00	96,23

❖ Belanja Modal

Belanja Modal dalam tahun 2023 digunakan untuk pembelian peralatan kantor yang terdiri dari :

Tabel 3.5
Jenis Pembelian Peralatan Kantor Tahun 2023
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu

No.	Jenis Peralatan	Anggaran	Realisasi	%	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Kursi Kerja Pejabat	4.500.000,00	4.400.000,00	97,78	2 unit
2	Kursi Rapat Kantor	18.750.000,00	18.250.000,00	97,33	25 unit
3	Meja Kerja Kantor	22.500.000,00	22.200.000,00	98,67	6 unit
4	Meja Kerja Pejabat	9.160.000,00	9.000.000,00	98,25	2 unit
5	Lemari Arsip	8.599.500,00	8.550.000,00	99,42	3 unit
6	Breket	2.000.000,00	1.950.000,00	97,50	1 unit
7	Televisi	17.756.000,00	17.650.000,00	99,40	1 unit
4	AC	43.656.000,00	42.400.000,00	97,12	4 unit



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2023

5	Gorden	8.900.000,00	8.900.000,00	100	20 meter
6	Komputer PC	15.600.000,00	15.400.000,00	98,72	1 unit
7	Printer	6.600.000,00	6.400.000,00	96,97	2 unit
	Jumlah	158.021.500,00	155.100.000,00	98,15	

Belanja Modal pada tahun 2023 dengan pagu anggaran Rp. 158.021.500,00 terealisasi Rp. 155.100.000,00 atau 98,15%. Dengan pencatatan capaian kinerja dalam rutinitas 100% karena pemanfaatan barang yang dibeli dapat digunakan untuk mendukung kinerja ASN & Non-ASN di OPD BAPPEDA Kabupaten Bengkayang.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sasaran yang menjadi perhatian utama adalah sasaran yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kreativitas, produktivitas dan profesionalisme aparatur sehingga meningkatkan kualitas penyelenggaraan APBD khususnya dalam pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan selain itu juga mewujudkan perencanaan pembangunan dan kebijakan yang responsif, antisipatif dan konsisten.

Kedua Sasaran Strategis termasuk dalam kategori **Berhasil**, dimana Sasaran Strategis tersebut

adalah :

- Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan untuk Mendukung Pembangunan Daerah.

Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran tersebut dipengaruhi oleh adanya upaya kerja keras Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang serta dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Bengkayang.

Namun demikian, capaian diatas dirasakan belum optimal, baik pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat, yang disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) di OPD masih kurang;
2. Besaran UP (Uang Persediaan) yang terlalu kecil sehingga Pengajuan GU (Ganti Uang) selanjutnya menyebabkan Penyerapan Lambat & ada beberapa Sub Kegiatan dilaksanakan di Semester II;
3. Kurangnya Inovasi yang dilakukan Perangkat Daerah;



4. Masih lemahnya pemahaman Perangkat Daerah terhadap pentingnya data-data sebagai bagian dari proses pembangunan;
5. Masih adanya beberapa Program dalam RKPD yang tidak selaras dengan Program dalam RPJMD.

B. SARAN

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pendidikan & Latihan Teknis ASN di OPD sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dapat bekerja secara optimal.
2. Besaran UP (Uang Persediaan) di rasionalisasi sesuai dengan Time Schedule Rencana Anggaran Kas (RAK) di OPD.
3. Meningkatkan upaya dukungan dan Pembinaan terhadap OPD.
4. Meningkatkan Pemahaman OPD dan Ketersediaan Data
5. Menselaraskan Program dalam RKPD dengan Program dalam RPJMD pada tahun selanjutnya.

Demikian disampaikan Laporan Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023. Diharapkan agar laporan ini dapat memberikan kontribusi positif didalam peningkatan kompetensi sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Bengkayang, 19 Januari 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bengkayang,



UCOK P. SASUGIAN, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19750828 199603 1 002